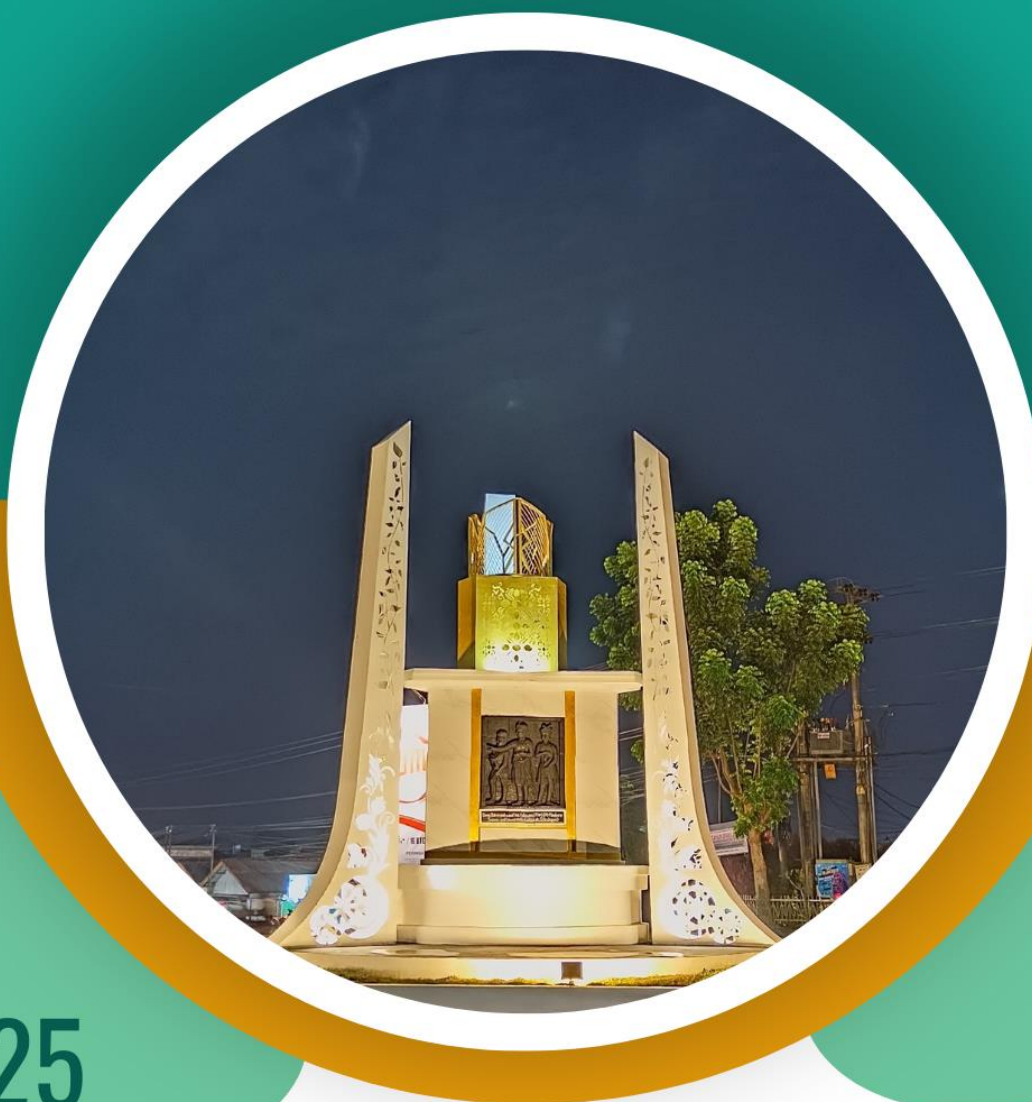




DLH KOTA PANGKALPINANG



RENCANA KERJA



2025

RENJA
(RENCANA KERJA)



dlh.pangkalpinangkota.go.id



dlh@pangkalpinangkota.go.id



(0717) 422876



Jl. Basuki Rahmat, Kel. Sriwijaya,
Kec. Gimaya, Pangkalpinang

Kata Pengantar

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Transisi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 – 2026 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pangkalpinang, April 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang,



Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19720824 199803 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

Bab 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
	1.3. Landasan Hukum	5
	1.4. Sistematika Penyusunan Renja	7

Bab 2	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	15
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	21
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang	21
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35

	TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM	
Bab	KEGIATAN	36
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	36
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	36
Bab	4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
Bab	5 PENUTUP	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka disebutkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah mendukung tugas Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Dengan adanya peninjauan kembali terhadap struktur organisasi dan kelembagaan di daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka sejak Januari 2017 Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dan Dinas Kebersihan bergabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan masuk dalam tipe B. Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat DLH mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota di bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DLH diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung program penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

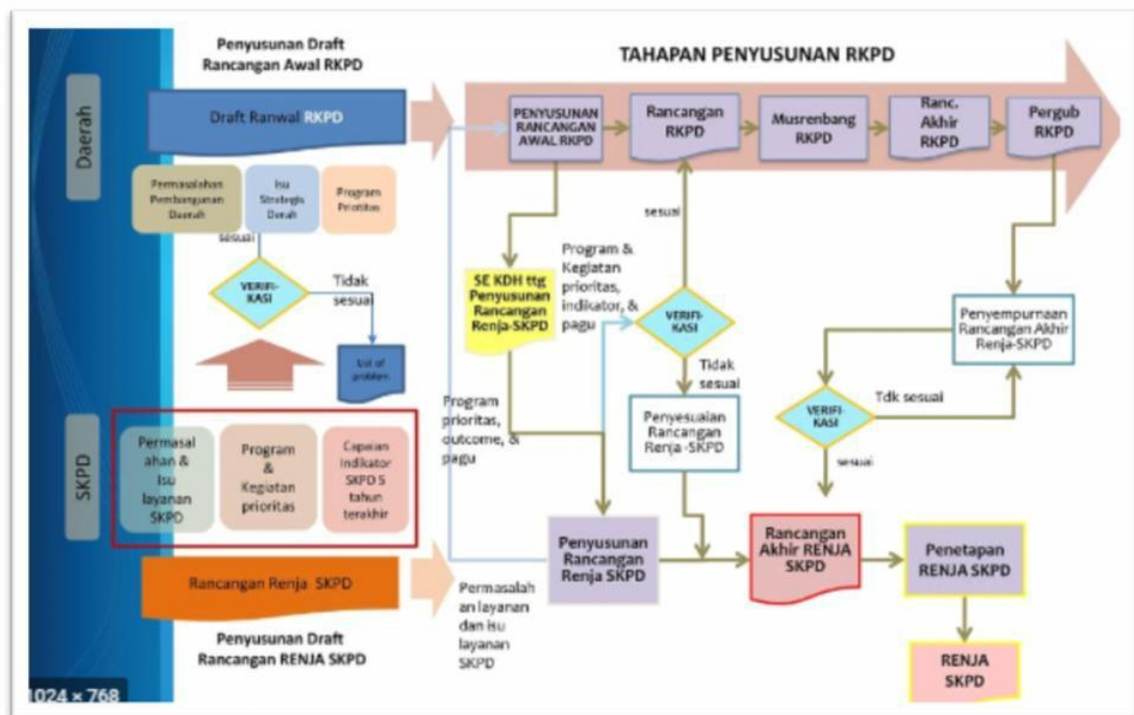


2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung program penyelenggaraan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penutupan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan Tahun 2025 berpedoman pada prioritas dan sasaran daerah yang dirumuskan dari:
 - a. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
 - b. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pangkalpinang
 - c. RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026
 - d. Renstra Transisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dengan sasaran prioritas daerah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup maka untuk mendukung terlaksananya Sasaran dan kebijakan Strategis Pembangunan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup di Tahun 2025 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.



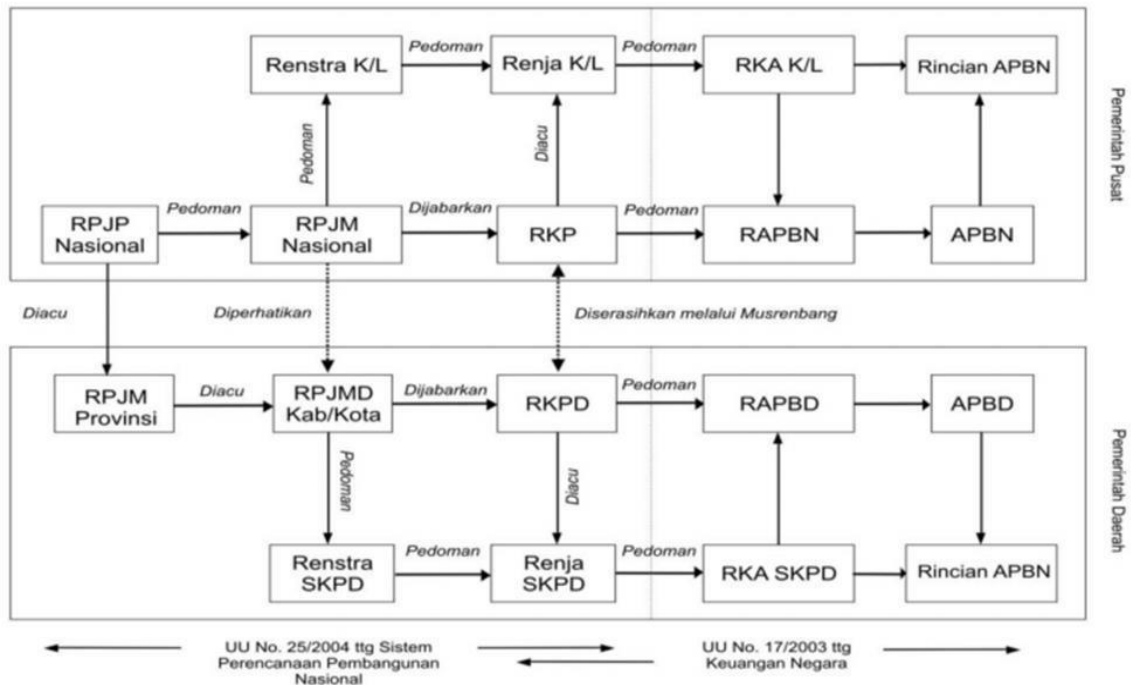
Gambar 1.1. Bagan Alur Rancangan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

1.2. Maksud dan Tujuan

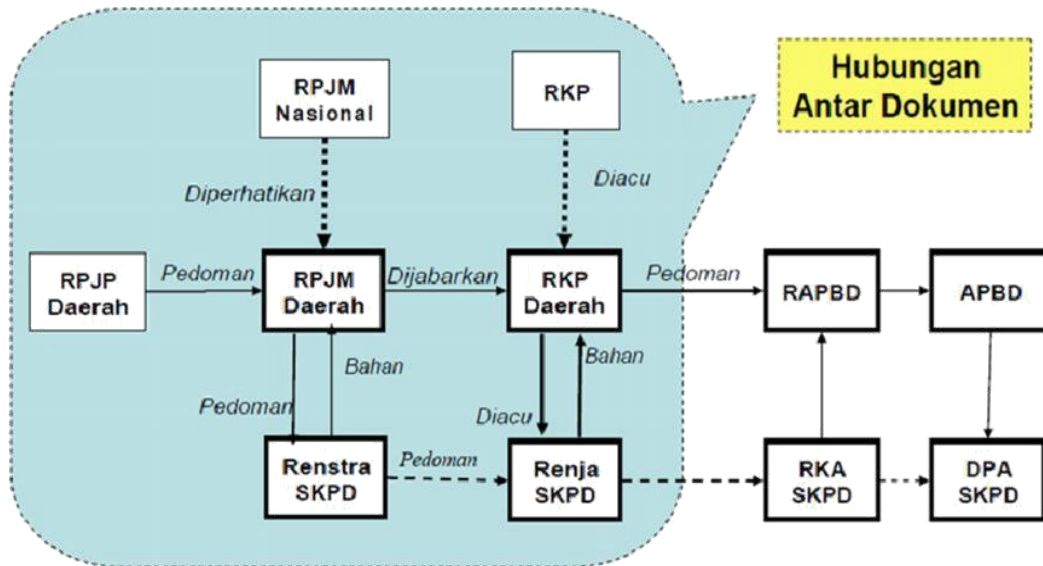
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

Skema hubungan perencanaan dan penganggaran seperti terlihat pada bagan di bawah ini:



Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan/ Rentsra Transisi dengan jangka waktu tiga Tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan antara satu dengan lainnya.



Gambar 1.2 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah :

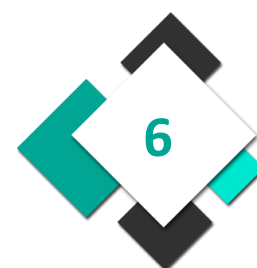
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
- m. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 2, Seri D Nomor 01);
- n. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7).

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Sistematika Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :



BAB I	Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.
BAB III	Tujuan, Sasaran, dan Program Kegiatan Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan.
BAB V	Penutup Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang sampai dengan Tahun 2024 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang s.d 2024

VERSI RENSTRA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program & Kegiatan RKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2022	Realisasi RKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	Nilai							0	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	80	Nilai							0	
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	%	100%	-	-	-	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100	%	100%	100%	100%	100	4 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)			100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup

2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD	2,3	%	100%	100%	100%	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya			100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0	%	100%	100%	100%	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	100%	100%	100%	100	5 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100	%	100%	100%	100%	100	100%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100%	100%	100%	100	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100	%	100%	100%	100%	100	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80	%	-	80%	100%	125	80%		0	Dinas Lingkungan Hidup

2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	100	%	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	%	-	1 Kali	1 Kali	100	2 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau			4,52 mg/l	2 mg/l	2,28 mg/l	114	2 mg/l		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku			4,67 mg/l	4,27 mg/l	2 mg/l	47	3 mg/l		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan			2%	3%	2%	67	3%		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	35	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4	Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	3 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang			21,23%	21,30%	21,30%	100	21,30%		0	Dinas Lingkungan Hidup

		Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	74	%							0	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Luas RTH publik yang dikelola	82	Ha	1 Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	100	2 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	74	%	73,33%	70%	78,57%	112	70%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis	25	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60	%	1 Data	1 Data	1 Data	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1	Penghargaan	1 Penghargaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100	1 Perusahaan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	30	%							0	Dinas Lingkungan Hidup

2.11.06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	%	1 Dokumen	4 Kali	2 Kali	50	2 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
02.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04. 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	100	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Penghargaan	1 Penghargaan	2 Penghargaan	200	1 Penghargaan		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	10	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	20	%							0	Dinas Lingkungan Hidup

2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Entitas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	100	%	60%	80%	100%	125	80%		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20	Kasus	3 Kasus	5 Kasus	6 Kasus	120	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani			94,59%	88%	95,80%	109	89,50%		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang			5,41%	12%	13,69%	114	10,50%		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengelolaan sampah di perkotaan	13	%							0	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA	90	%	94,59%	88%	95,80%	109	1 Laporan		0	Dinas Lingkungan Hidup

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran : “Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan”.

Tolok ukur capaian sasaran terdiri dari tiga indikator yaitu persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani dengan target 89,5%, persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan dengan target 30%, persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan target 21,33%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas masing-masing dengan rumus tersendiri :

1. Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani

Berikut data Jumlah Sampah Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Perkiraan Produksi Sampah	181.556,18	Kg/Hari
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	165.581	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	14.000	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang terkelola	174,66	Kg/Hari
Jumlah Sampah yang tidak terangkut dan terkelola	1.800,52	Kg/Hari

Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani

Untuk persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani}}{\text{Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3}} \times 100 \%$$
$$\frac{165.581}{181.556,18} \times 100 \% = 91,20\%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 89,5 %, maka indikator diatas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena Pasukan Kuning sangat konsen terhadap sampah. Mulai dari petugas kebersihan, dump truk, arm roll, mobil sweeping, mobil sapu sudah berjalan maksimal. Selain itu, Pemerintah Kota

Pangkalpinang juga telah menyediakan contact person yang dapat dihubungi masyarakat yang berkaitan dengan masalah penanganan sampah. Ketika menemukan penumpukan sampah, maka masyarakat dapat melaporkan ke contact person 0821-8476-1262 dan nomor sub koordinator yang membidangi 0812-7996-9633.

2. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Berikut data pelaksanaan pengawasan perusahaan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023:

Evaluasi pemenuhan sanksi : 39 perusahaan
Jumlah Pengawasan : 45 Perusahaan
(daftar perusahaan terdapat pada lampiran)

Persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan

Untuk persentase kepatuhan pelaksanaan dokumen lingkungan, rumusnya adalah

$$\frac{\text{Evaluasi Pemenuhan Sanksi}}{\text{Jumlah Pengawasan}} \times 100 \%$$
$$\frac{40}{45} \times 100 \% = 88,89\%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 30%, maka indikator di atas dinyatakan berhasil. Hal ini terjadi karena pengawasan terhadap perusahaan/pelaku usaha di kota pangkalpinang telah ditingkatkan pada tahun ini, dengan pembinaan yang intens dari Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan kesadaran pemrakarsa dalam melaksanakan kewajibannya yang tertera dalam dokumen lingkungan.

3. Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Berikut data ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang Tahun 2023:

Luas RTH:

(pada lampiran)

Luas Wilayah Perkotaan:

Luas Adm Kota Pangkalpinang

10.455,65 Ha

Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Untuk persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau), rumusnya adalah

$$\frac{\text{Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100 \%$$
$$\frac{2.219,24}{10.455,65} \times 100 \% = 21,225 \%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 21,33 %, maka indikator diatas dinyatakan belum berhasil. Hal ini terjadi karena adanya perubahan RTRW Kota Pangkalpinang.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat dilihat di Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	RUMUSAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	7	12	13	14	15	16	17
	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH Tahun N yang tercapai DIBAGI Target IKLH RPJMD pada Tahun N DIKALI 100	%	103,99	99,64	102,54	98,74	101,14	98,05
		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Persentase pengelolaan sampah dan limbah B3 yang tertangani	Jumlah sampah dan Limbah B3 yang ditangani DIBAGI Jumlah timbulan sampah dan Limbah B3 DIKALI 100	%	86,50	94,31	88,00	95,71	89,50	91,20
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Evaluasi Pemenuhan Sanksi DIBAGI Jumlah Pengawasan DIKALI 100	%	15,87	22,73	22,93	44,12	30,00	88,89
			Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) DIBAGI Luas Wilayah Perkotaan DIKALI 100	%	21,31	21,225	21,32	21,225	21,33	21,225
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah PAD yang dihasilkan Perangkat Daerah DIBAGI jumlah PAD keseluruhan DIKALI 100	%	100	-	100	100	100	100
			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	100

			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasana yang ada DIKALI 100	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terlaksana DIBAGI Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup DIKALI 100	%	80		80	100	80	100
			Kualitas air danau	Mempertahankan mutu kualitas air danau diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l	2	4,52	2	2,28	2	2,06
			Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Peningkatan mutu kualitas air diwakili parameter BOD (mg/l)	mg/l	5,54	4,67	4,27	2	3	2,49
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi DIBAGI luas lahan kritis keseluruhan DIKALI 100	%	3	2	3	2	3	0
			Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Luas Lahan dibagi luas wilayah dikali 100	%	21,2	21,23	21,3	21,3	21,3	21,225
			Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan izin DIBAGI jumlah perusahaan yang mengajukan izin DIKALI 100	%	70	73,33	70	78,57	70	72,72
			Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001		Perusahaan	0	1	1	1	1	1
			Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penghargaan	1	1	1	2	1	1
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan DIBAGI Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terregistrasi DIKALI 100	%	80	60	80	100	80	100
			Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Jumlah Sampah yang ditangani DIBAGI Jumlah Timbulan Sampah DIKALI 100	%	86,5	94,59	88	95,8	89,5	91,20

			Persentase Timbunan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah Sampah yang terkelola dengan metoede 3 R DIBAGI Jumlah Timbunan Sampah DIKALI 100	%	13,5	5,41	12	13,69	10,5	13,32
--	--	--	---	--	---	------	------	----	-------	------	-------

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH yaitu :

1. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air).
2. Ancaman penurunan keanekaragaman hayati.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Keterbatasan Sarana Prasarana pengolahan persampahan.
5. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir.
6. Kurangnya akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
7. Pemanasan global.
8. Penguatan laboratorium lingkungan.
9. Penguatan kinerja pengelolaan persampahan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis OPD periode 2024-2026 yang berakhir pada tahun 2026, dan diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang.

Review terhadap RKPD/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 Kota pangkalpinang tertuang dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

**Review terhadap RKPD/ Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota pangkalpinang
Tahun 2025**

N o.	RANCANGAN AWAL SKPD/RENSTRA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catat an Penti ng
	Program/Kegiatan/Sub.Kegi atan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub.Kegi atan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74%	7.625.008.9 68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74%	6.797.195.6 22	
		DLH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85%			DLH	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	85%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	15.375.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.125.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	3 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	2 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.125.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100%	6.613.654.104		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100%	4.692.446.146	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	6.111.916.604		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	4.674.646.246	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	473.550.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	20.500.000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.125.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.562.500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.799.900	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	2,31%	15.375.000		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	2,31%	0	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.125.000		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	

	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.250.000		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0%	87.125.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	0%	50.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	51.250.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	25.625.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	10.250.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	256.250.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	DLH	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100%	373.911.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.250.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.700	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.250.000		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.400.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.625.000		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.875.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DLH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.547.900	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.750.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	95.963.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	102.500.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	20.500.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DLH	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	20.500.000	
	Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.500.000		Pengadaan Mebel	DLH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	DLH	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	271.625.000		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	DLH	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.465.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapangan yang Disediakan	1 Laporan	153.750.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapangan yang Disediakan	1 Laporan	900.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.625.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	92.250.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	540.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	DLH	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	345.104.864	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	DLH	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	215.837.976	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.445.464	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29.800.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	191.159.400	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	186.037.976	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DLH	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	51.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DLH	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80%	320.375.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80%	88.725.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	DLH	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	100%	66.625.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	DLH	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	1 Dokumen	69.950.000	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	41.000.000	-	-	-	-	-	

	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.625.000		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	69.950.000	
							Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	DLH	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DLH	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	253.750.000		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DLH	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	18.775.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	DLH	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	51.250.000		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	DLH	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DLH	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	102.500.000		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	DLH	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Dokumen KLHS KRPlainnya yang berpotensimenimbulkan dampak/resikolingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	18.775.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	36%	568.875.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	36%	579.994.500	

	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	DLH	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4 Laporan	568.875.000	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	DLH	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	4 Laporan	579.994.500	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	DLH	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	41.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut	DLH	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	15.375.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	DLH	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	49.994.500	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	512.500.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	DLH	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	430.000.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	75%	2.357.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	75%	1.299.983.275	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	DLH	Luas RTH publik yang dikelola	82 Ha	2.357.500.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	DLH	Luas RTH publik yang dikelola	82 Ha	1.299.983.275	
	Pengelolaan Kebun Raya	DLH	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60,8 Ha	307.500.000	Pengelolaan Kebun Raya	DLH	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60,8 Ha	299.983.450	

	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21,16 Ha	2.050.000.000		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21,16 Ha	999.999.825	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	74,5%	35.875.000		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	74,5%	33.261.500	
	Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH	Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25%	20.500.000		Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH	Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25%	33.261.500	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DLH	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	10.250.000		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DLH	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	23.261.500	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	10.250.000		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	10.000.000	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61%	15.375.000		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61%	0	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	15.375.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	0	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	35%	20.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	35%	65.970.000	
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	20.500.000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	65.970.000	

	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	10.250.000	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH	DLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	17.000.000	
	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidiup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.250.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	45 Badan Usaha	48.970.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	41.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	0	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	100%	41.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	100%	0	

	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	DLH	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga	10.250.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	DLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	0	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	10.250.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye	DLH	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	10.250.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye	DLH	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	0	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	DLH	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	10 Keluarga	10.250.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	DLH	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	10 Keluarga	0	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	10%	20.500.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	10%	35.020.000	
		DLH	Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	20%			DLH	Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	20%		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	20%	20.500.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH	Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	20%	35.020.000	

	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	20.500.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	35.020.000	
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	100%	10.250.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah	100%	72.980.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20 Kasus	10.250.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20 Kasus	72.980.000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	DLH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	10.250.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	DLH	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	72.980.000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan	14%	14.514.292.602	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	Persentase pengelolaan sampah di perkotaan	14%	9.910.883.016	
	Pengelolaan Sampah	DLH	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA	85%	14.514.292.602	Pengelolaan Sampah	DLH	Persentase Sampah yang terangkut ke TPA	85%	9.910.883.016	

	Penanganan sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota	DLH	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	64183,42 Ton	14.506.092.602	-	-	-	-	0	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2.050.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	5.541.335.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	2.050.000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0	
	Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	DLH	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	2.050.000	-	-	-	-	-	

							Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	DLH	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0	
							Penanganan sampah melalui pengangkutan	DLH	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	64183,42 Ton	3.816.895.016	
							Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	DLH	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10 Unit	552.653.000	
							Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	DLH	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	0	
		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota	DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	2.050.000	-	-	-	-	-	
						25.514.176.570					18.884.012.913	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah para petugas di tingkat kelurahan, Kecamatan dan RT/RW di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan juga berupa pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian masih terdapat kritik dan saran dari pihak eksternal yang menyangkut peningkatan pelayanan seperti ketersediaan fasilitas pendukung pengelolaan sampah berupa tong sampah.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah :

1. Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2.2. Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal.

3.2.3. Strategi

Strategi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah **"Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan"**. Berpedoman pada strategi tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang untuk 3 (tiga) tahun ke depan merumuskan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup

2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)
4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota
6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup
8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup
9. Melaksanakan pengelolaan persampahan.

3.3.4. Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan program prioritas RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah "***Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***", maka kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang untuk 3 (tiga) tahun ke depan adalah:

1. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kota
2. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kota
3. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Mengelola keanekaragaman hayati di kota
5. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas kota
6. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota
7. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat kota
8. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat kota
9. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kota
10. Menangani sampah di TPA/TPST.

3.3.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 s.d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Outcome	Target (%)		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,98 Indeks	61,09 Indeks	61,17 Indeks
2		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	95,00 %	95,50 %	96,00 %
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	30,00 %	35,00 %	40,00 %
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	25,89 %	25,99 %	26 %
			Indeks Kualitas Air	51,23 %	51,33 %	51,43 %
			Indeks Kualitas Udara	89,03 %	89,14 %	89,24 %

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan suatu peta yang strategis yang menggambarkan kaitan sebab akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal.

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada tiga perspektif diatas. Indikator

kegiatan perspektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada perspektif diatas.

Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan dimasing-masing tempat.

3.3.6. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Outcome	Target
1	Meningkatkan kualitas penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,09 Indeks
2		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, dan pelayanan internal	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	95,50 %
			Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	35,00 %
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	25,99 %
			Indeks Kualitas Air	51,33 %
			Indeks Kualitas Udara	89,14 %

3.3.7. Program dan Kegiatan

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

B. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Kebun Raya
 - b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1. Penyimpanan sementara Limbah B3

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

E. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
 - d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat

G. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

H. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

I. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah
 - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - d. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota

J. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- a. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - b. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Mebel
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 011/SE/Bapperida/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp. Rp. 18.884.012.913,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah) dan program prioritas antara lain.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Persampahan.

Untuk jelasnya Rencana Kerja Akhir dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dapat kita lihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						18.884.012.913,00							20.721.908.775,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.884.012.913,00							20.721.908.775,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						18.884.012.913,00							20.721.908.775,00		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90 Nilai 75 Nilai			85 Nilai 74 Nilai	6.797.195.622,00						90 Nilai 75 Nilai	7.867.948.121,00		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %			100 %	0,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	18.952.080,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		9.016.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		5.338.725,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		4.597.005,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %			100 %	4.692.446.146,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	5.417.303.507,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.674.646.246,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAHA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		4.908.378.558,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		490.235.054,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAHA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAHA TRANSFER UMUM-DAHA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	2.799.900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		2.939.895,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD</i>	2,33%			2,31 %	0,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	2,33%	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN</i>	0%			0 %	50.000.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0 %	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				45 Paket	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	50.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	373.911.500,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	514.312.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.999.700,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		10.499.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	29.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		30.870.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		121.705.585,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.547.900,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		40.475.295,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	95.963.900,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		100.762.095,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	1.465.000.000,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	1.538.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	900.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		945.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	540.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		567.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	100 %			100 %	215.837.976,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	326.629.874,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	29.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		31.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	186.037.976,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		195.339.874,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80 %			80 %	88.725.000,00						80 %	124.713.750,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	100.3%			100 %	69.950.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	69.950.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %			100 %	18.775.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	19.713.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	18.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		19.713.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	36 %			36 %	579.994.500,00						36 %	577.494.225,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	12:Laporan			4 Laporan	579.994.500,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	4 Laporan	577.494.225,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		73.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	49.994.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		52.494.225,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				2 Dokumen	430.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		451.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati</i>	75 %			75 %	1.299.983.275,00						75 %	1.364.982.438,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas RTH publik yang dikelola</i>	82%			82 %	1.299.983.275,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	82%	1.364.982.438,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
			<i>Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				60,8 Ha	299.983.450,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		314.982.622,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				21,16 Ha	999.999.825,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		1.049.999.816,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	<i>Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3</i>	74,5 %			74,5 %	33.261.500,00						74,5 %	34.924.575,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase terverifikasinya kepastian Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis</i>	25%			25 %	33.261.500,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	25%	34.924.575,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	23.261.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		24.424.575,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				3 Laporan	10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayannya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62 %			61 %	0,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	62 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	35 %			35 %	65.970.000,00						35 %	69.268.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %			100 %	65.970.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	69.268.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	17.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		17.850.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				45 Badan Usaha	48.970.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		51.418.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100 %			100 %	0,00						100 %	0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup	100 %			100 %	0,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				10 Keluarga	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH Persentase masyarakat yang kinerjanya baik dalam rangka PPLH	10% 20%			20 % 10 %	35.020.000,00						10% 20%	36.771.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat atau lembaga yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	20%			20 %	35.020.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	20%	36.771.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	35.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		36.771.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota</i>	100 %			100 %	72.980.000,00						100 %	76.629.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	60 Kasus			20 Kasus	72.980.000,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	60 Kasus	76.629.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				20 Pengaduan	72.980.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		76.629.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase pengelolaan sampah di perkotaan</i>	14 %			14 %	9.910.883.016,00						14 %	10.569.177.166,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Sampah yang terangkut ke TPA</i>	80 %			85 %	9.910.883.016,00			-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	80 %	10.569.177.166,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				5 Kelompok	5.541.335.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Lingkungan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		5.818.401.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				64183,42 Ton	3.816.895.016,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		4.007.739.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				10 Unit	552.653.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		580.285.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		157.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			J U M L A H					18.884.012.913,00							20.721.908.775,00	

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Surat Edaran Nomor 011/SE/Bapperida/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp. Rp. 18.884.012.913,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah) melakukan pemetaan sebagai mana dimaksud diatas.

BAB 5

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, April 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pangkalpinang, f


f **Bartholomeus Suharto, S.T., M.Si.**
Pembina Utama Muda
Nip. 19720824 199803 1 002



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Basuki Rahmat Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 422876. e-mail : dlh@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 039 / KEP/DLH/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan RENJA (RKT, RKA DAN DPA) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetulan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);
10. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);

11. Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 011/SE/BAPPERIDA/III/2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk saudara-saudara yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Kerja Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) adalah:
a. Menghimpun semua kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025;
b. Mempersiapkan data-data yang diperlukan;
c. Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA), Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) berakhir setelah Tahun Anggaran berakhir atau sesuai masa penugasannya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 04 Maret 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KOTA PANGKALPINANG, 4



DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG

BARTHOLOMEUS SUHARTO, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720824 199803 1 002

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.
2. Inspektur Kota Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 039 /KEP/DLH/III/2024
TANGGAL : 04 Maret 2024

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA
(RKT, RKA DAN DPA)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2025
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
2. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
4. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keusakan Lingkungan Hidup
 4. Staf PEP dan Keuangan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,



BARTHOLOMEUS SUHARTO, S.T., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19720824 199803 1 002